



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENI NOVIANA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 868009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/169 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 2.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 679.500.000

1. MOBIL, HONDA HR-V 1500CC / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, AION V EV SUV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 491.500.000
3. MOTOR, WOOW MOTOR LISTRIK Tahun 2025, HADIAH Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 434.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 33.570.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.586.473.001

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.734.343.001

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.734.343.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.